CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN MEKANISMENYA PADA BPRS

Niken Lestari

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen

niken.lestari10@gmail.com

ABSTRAK

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip-prinsip yang mencampurkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan wewenang perusahaan untuk bisa dipertanggung jawabkan ke pemangku kepentingan. Fokus penelitian ini adalah studi kepustakaan atau literature tentang penelitian yang berkaitan dengan *corporate governance* pada bank syariah dan dewan pengawas syariah serta mekanismenya pada BPRS. Pada dasarnya penerapan prinsip good corporate governance sama bagi bank konvensional dan bank syariah, hal ini mengacu pada "Pedoman Good Corporate Governance Bank Indonesia" yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Kebijakan Governance. Bedanya, prinsip-prinsip good corporate governance di bank syariah diatur secara ketat dalam Pasal 34 ayat (1) UU No 21 Tahun 2008. Perbedaan lainnya terletak pada prinsip-prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah, karena bank syariah tidak hanya digalakkan. Hal ini juga diawasi tidak hanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, tetapi juga oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada umumnya dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah khususnya.

Kata Kunci: GCG, Bank Syariah, Dewan Pengawas Syariah, BPRS

ABSTRACT

Good Corporate Governance (GCG) or good corporate governance are the principles that mix and control the company to achieve a balance between the strengths and authority of the company to be accountable to stakeholders. The focus of this research is the study of literature on research related to corporate governance in Islamic banks and Islamic supervisory boards and their mechanisms in BPRS. Basically the application of the principles of good corporate governance is the same for conventional banks and Islamic banks, this refers to the "Bank Indonesia Good Corporate Governance Guidelines" issued by the National Commission on Governance Policy. The difference is that the principles of good corporate governance in Islamic banks are strictly regulated in Article 34 paragraph (1) of Law No. 21 of 2008. Another difference lies in the Islamic

principles used by Islamic banks, because Islamic banks are not only encouraged. This is also supervised not only by the Financial Services Authority, but also by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (MUI) in general and supervised by the Sharia Supervisory Board in particular.

Keywords: GCG, Islamic Bank, Sharia Supervisory Board, BPRS

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank yang beroperasi menurut prinsip Syariah adalah bank yang sudah melakukan sesuai dengan ketentuan Syariah Islam, khusus yang berkaitan dengan tata cara muamalah dalam Islam. Di proses konversinya, praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba dihindari diisi dengan kegiatan investasi berbasis bagi hasil dan trade finance atau praktik bisnis yang dilakukan dalam bentuk bisnis yang ada pada masa sebelum Rasulullah tapi tidak dilarang oleh beliau.¹

Penerapan *Good Corporate Governance* atau GCG di perbankan syariah telah ditetapkan oleh PBI No. 11/33/PBI/2009.² Penerapan GCG pada bank syariah bertujuan tidak hanya untuk mencapai pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prinsip syariah, tetapi untuk menghasilkan kepentingan yang lebih luas dan juga Perbankan syariah tidak terlepas dari risiko pembiayaan yang disalurkan. Oleh karena itu, operasional bank syariah tidak lepas dari persyaratan tata kelola perusahaan yang baik.

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik ialah prinsip-prinsip yang mencampurkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan wewenang perusahaan

¹ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), ha. 33.

² Indra Siswanti, Implementasi Good Corporate Governance Pada Kinerja Bank Syariah, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2016, hal. 307

untuk bisa dipertanggung jawabkan ke pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip itu digunakan sebagai standar yang bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan, efisiensi dan tanggung jawab sosial. Karena itulah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan publik dan internasional, karena untuk prasyarat mutlak bagi perkembangan dunia usaha yang tertib dan sehat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan pengambilan kepustakaan (*library search*). Metode penelitian ini merupakan rangkaian yang berkaitan dengan kepustakaan atau metode pengumpulan data penelitian, yang objek penelitiannya diteliti dengan menggunakan berbagai informasi perpustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, jurnal dan dokumen).³ Penelitian kepustakaan atau penelitian bibliografi adalah penyelidikan yang mengkaji atau merevisi secara kritis temuan, gagasan atau wawasan yang terkandung dalam karya yang berorientasi ilmiah dan merumuskan kontribusi teoretis dan metodologis pada topik tertentu. Fokus penelitian ini adalah studi kepustakaan atau literature tentang penelitian yang berkaitan dengan *corporate governance* pada bank syariah dan dewan pengawas syariah serta mekanismenya pada BPRS.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dari Corporate Governance

Corporate governance dapat menjadi seperangkat proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola langsung atau memimpin bisnis atau usaha perusahaan terkait dengan tujuan mempercepat harga perusahaan dan komunitas bisnis. Ada banyak definisi tentang apa yang dimaksud *corporate governance*.

³ Ahmad Sodiq. Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG): Studi Kasus pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung. Volume 1 Nomor 2, November 2017, hal 34

Menurut Cadbury Committee, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah ajaran yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang akan menuai stabilitas antara kekuatan dan wewenang organisasi dalam menawarkan tugas kepada pemegang saham pada khususnya, dan pemangku kepentingan umum.⁴ selain itu, menurut *World Bank Good Corporate Governance* (GCG), adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah - kaidah yang harus diikuti untuk meningkatkan kinerja sumber daya perusahaan bekerja secara efisien, dan menciptakan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Di sisi lain GCG Workshop Kantor Meneg PM BUMN Desember 1999, dirumuskan bahwa *good corporate governance* berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif, yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.⁵

Kemudian menurut IICG (*The Indonesian Institute for Company Governance*), pengertian *good company governance* akan diuraikan karena struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan dalam upaya untuk memasok nilai tambah bagi perusahaan secara lancar dalam jangka panjang, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, didukung oleh hukum dan standar yang berlaku.

Berdasarkan definisi di atas, GCG pada dasarnya adalah (input, metode, output) dan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), khususnya dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, penandatangan yang berwenang dan direksi untuk

⁴ Hendrik Manoso, *Good Corporate Governance Untuk meningkatkan Kualitas Lapangan Keuangan* (Jakarta: PT.Norlive Kharisma Indonesia, 2016), Hal.16

⁵ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (yOgyakarta: UUP STIM YKPN 2016), hal.

mencapai tujuan perusahaan. GCG digunakan untuk mengelola hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan besar dalam strategi perusahaan.

B. Konsep dan Prinsip Dasar *Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan yang baik memiliki dua konsep. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk menerima informasi yang akurat dan tepat waktu. Kedua kewajiban perusahaan untuk memberikan informasi yang benar, tepat waktu, dan transparan tentang kinerja kepemilikan perusahaan dan pemangku kepentingan.⁶

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), mengakui 5 prinsip pada prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), responsibilitas (*responcibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

a. *Transparency* (Transparansi)

Untuk menjaga penilaian yang baik dalam menjalankan bisnis, perusahaan perlu menyediakan informasi penting dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif dalam mengungkapkan tidak hanya hal-hal yang diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan, tetapi juga hal-hal yang penting untuk mengambil keputusan para pemangku kepentingan seperti pemegang saham dan kreditur.

b. *Accountability* (akuntabilitas)

Perusahaan harus mau menggambarkan kinerjanya dengan jelas dan jujur. Dengan demikian, perusahaan harus dikelola secara tepat, terukur

⁶ Abdul Haris Romdhoni, Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. Vol.16. 2015. Hal.126

dan sejalan dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tanggung jawab bisa menjadi prasyarat untuk kinerja yang berkelanjutan.

c. *Responsibility* (resposibilitas)

Corporate atau perusahaan harus menyesuaikan diri dengan hukum dan aturan dan bertanggung jawab kepada komunitas dan lingkungan mereka untuk menjaga kelangsungan bisnis jangka panjang dapat dipertahankan dan diakui sebagai warga perusahaan yang layak.

d. *Independency* (independensi)

Untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing unit perusahaan tidak saling mendominasi atau mengganggu pihak lain.

e. *Fairness* (Kewajaran dan kesetaraan)

Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan berbagai pemangku kepentingan, yang ditopang oleh prinsip kewajaran dan kesetaraan.⁷

C. Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yakni prinsip-prinsip hukum perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Inisiatif pendirian bank syariah di Indonesia diprakarsai Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990 dan memuncak dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Perbankan nasional segera ditanggapi oleh pemerintah dengan mengesahkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun

⁷ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance*, (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), hal. 5-7

1992 tentang Perbankan, hal ini kemudian diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. Krisis ekonomi yang terjadi tidak hanya merusak sistem perbankan nasional pada tahun 1998, tetapi juga berdampak pada titik tolak perkembangan sistem Perbankan syariah di Indonesia.

Beberapa bank konvensional mulai mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah. Menyikapi perkembangan perbankan syariah yang menonjol dalam sistem perbankan nasional, maka diundangkan UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pada tanggal 16 Juli 2008 sebagai badan hukum tersendiri bagi bank syariah di Indonesia.

Tidak seperti bank konvensional, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di bank syariah secara tegas diatur dalam Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa bank syariah wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang Prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme dan keadilan dalam menjalankan usahanya. Apalagi jika membandingkan prinsip good corporate governance di bank konvensional dan bank syariah, perbedaan mendasar terletak pada prinsip syariah yang diterapkan bank syariah. Dalam ilmu ekonomi konvensional seseorang menggunakan dasar filosofis positivisme, yang didasarkan pada pengalaman manusia dan studi empiris dan tidak percaya pada wahyu Tuhan. Dalam ekonomi Islam, di sisi lain, wahyu Allah dalam Alquran adalah pedoman yang paling penting. Oleh karena itu, yang mendorong bank syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah kepentingan Tuhan, yaitu dalam kaitannya dengan ibadah kepada Allah. Prinsip Syariah didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan universalitas. Nilai-nilai tersebut berlaku untuk peraturan perbankan syariah.⁸

Prinsip perbankan syariah adalah bagian dari ekonomi Islam. Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah larangan baerbagai bentuk riba dalam berbagai

⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.40.

bentuknya dan penggunaan sistem seperti bagi hasil. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik juga bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai bank syariah secara penuh dan konsisten mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini membutuhkan pembinaan dan pengawasan oleh badan independen. Pasal 29 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pembinaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pada aspek kelembagaan, kepemilikan dan pengendalian (*fit and proper test*), kegiatan usaha, pelaporan dan aspek lain yang terkait dengan kegiatan operasional bank, sedangkan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan tidak langsung berdasarkan laporan dan pengawasan perbankan langsung berupa pemeriksaan pada kantor bank yang bertanggung jawab.

Perbedaan lain prinsip good governance antara bank konvensional dan bank syariah adalah adanya pengawasan khusus terhadap perbankan syariah yang dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada umumnya dan Dewan Pengurus Syariah khususnya. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertugas mendorong penerapan nilai-nilai Syariah dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan keuangan pada khususnya dengan mengeluarkan fatwa tentang instrumen keuangan, mengeluarkan fatwa tentang produk dan layanan keuangan Syariah serta mengawasi pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan.⁹

D. Budaya Organisasi Pada Bank Syariah

Menurut F.E. Kast dan J.E. Rosenzweig, budaya organisasi adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan pemahaman yang penting yang dimiliki bersama oleh para anggotanya. Budaya organisasi mengungkapkan nilai-nilai atau gagasan dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh anggota, yang diwujudkan dalam alat-alat simbolik seperti mitos, upacara, cerita, legenda dan

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h.46.

bahasa khusus. Ini berarti bahwa budaya organisasi secara umum atau secara khusus merupakan sistem nilai, norma atau aturan, filosofi, keyakinan dan sikap (perilaku) yang diadopsi oleh anggota yang dapat mempengaruhi pola kerja dan manajemen organisasi.¹⁰

Oleh karena itu, budaya organisasi dapat dikatakan sebagai seperangkat asumsi atau keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang diyakini dan diilhami oleh semua anggota tempat kerja, yang kemudian diadopsi dan dikembangkan dalam suatu organisasi dan bertindak sebagai konselor. Pada perilaku anggota organisasi terhadap pola kerja dalam membentuk Visi dan misi bersama.

Oleh karena itu, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem nilai dan keyakinan bersama yang mempengaruhi perilaku pekerja dalam budaya organisasi perbankan syariah adalah ajaran Islam. Hal itu dapat dilihat dari penerapan prinsip-prinsip syariah bank syariah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta fatwa ulama fiqh yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dan Hadits juga menjadi dasar sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitasnya di bank syariah. Mustahil menjalankan organisasi yang menganut prinsip-prinsip Syariah (Al Quran dan Hadits) mengabaikan nilai-nilai Alquran dan Hadits dalam kegiatan personel bank syariah.

Selain memiliki musholla di bank syariah, sehingga dapat membantu nasabah muslim saat berada di bank syariah dan masuk waktu sholat. Sangat membantu pelanggan muslim untuk mengoptimalkan waktu mereka. Selain salat wajib, nasabah juga dapat melaksanakan salat suna, seperti salat dhuha, sehingga waktu tunggu tersebut dapat digunakan untuk kegiatan bermanfaat lainnya. Budaya tersebut adalah salah satu artefak yang merupakan unsur budaya organisasi pada perbankan syariah.

E. Kekhususan *Good Corporate*

¹⁰ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal.249

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, bank memiliki dua karakteristik utama yang tidak ada pada industri lain, yaitu: ¹¹

1. Asimetri informasi pada industri perbankan

Asimetri informasi dalam industri perbankan lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan industri lainnya. Asimetri ini muncul antara deposan, pengelola bank, pengelola bank, debitur, pemilik/pemegang saham, bank dan regulator. Semakin besar asimetri informasi antara pihak eksternal dan internal, semakin sulit bagi pihak luar untuk memantau kinerja pemimpin bank.

Hal ini semakin diperumit oleh banyaknya deposan dan debitur yang besar dan tersebar. Kompleksitas meningkat ketika jumlah pemangku kepentingan juga besar dan terdistribusi. Kehadiran pemegang saham pengendali yang dominan membuat, manajemen menjadi lebih mudah, tetapi ada juga berisiko penyelewengan, penipuan, atau penyelewengan dana bank dan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok perusahaan. Asimetri informasi keuangan ini merupakan penyebab tingginya risiko keuangan, operasional maupun hukum, dan merupakan salah satu penyebab utama kejahatan perbankan.

2. Peran Regulasi dalam *corporate governance*

Peran regulator di bidang perbankan adalah melaksanakan kebijakan pengaturan dan pengawasan untuk mencapai stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui sistem kelembaga perbankan yang lebih kuat, efisien, dan menguntungkan. Aturan tata kelola perusahaan di industri umumnya bersifat sukarela dan tidak menghalangi hal-hal yang berkaitan dengan proses tata kelola perusahaan. Dalam industri perbankan, peraturan yang ada secara langsung mempengaruhi proses tata kelola bank dan diatur dalam bentuk undang-undang dan harus dipatuhi. Pelanggaran terhadap peraturan ini merupakan ketidak patuhan dan tidak akan dikenakan sanksi hukum.

¹¹ Andrianto, M. Anang Firmansyah, Op. Cit., hal. 432-433

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, karena bank konvensional dan bank syariah wajib menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam menjalankan usahanya karena bank konvensional dan bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan mempercayakan dana tersebut atas dasar. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

Pada dasarnya penerapan prinsip *good corporate governance* sama bagi bank konvensional dan bank syariah, hal ini mengacu pada “Pedoman Good Corporate Governance Bank Indonesia” yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Kebijakan Governance. Bedanya, prinsip-prinsip *good corporate governance* di bank syariah diatur secara ketat dalam Pasal 34 ayat (1) UU No 21 Tahun 2008. Perbedaan lainnya terletak pada prinsip-prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah, karena bank syariah tidak hanya digalakkan. Hal ini juga diawasi tidak hanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, tetapi juga oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada umumnya dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah khususnya.

Pada gilirannya budaya organisasi dan keyakinan bersama yang mempengaruhi perilaku pekerja dalam budaya organisasi perbankan syariah adalah ajaran Islam. Hal ini dibuktikan dengan cara bermuamalah dalam bank syariah yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, dalam bentuk artefak yaitu adanya masjid yang merupakan unsur budaya organisasi di perbankan syariah. Perbankan sendiri memiliki dua karakteristik utama yang tidak ditemukan di industri lain, yaitu: Asimetri informasi di perbankan dan peran regulator di sektor perbankan adalah untuk melaksanakan kebijakan pengaturan dan pengawasan

untuk mencapai stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui sistem lembaga perbankan yang lebih kuat, efisien, dan bermanfaat.

B. Saran

Untuk merasakan manfaat dari tata kelola perusahaan yang baik, bank tidak hanya perlu mematuhi peraturan, tetapi juga bagaimana bank dapat menerapkan konsep tata kelola perusahaan yang baik dalam perbankan sehari-hari. Hal ini harus dilakukan secara menyeluruh melalui pola kerja, sikap mental dan kebiasaan yang ada di perbankan. Sebab pencapaian good corporate governance akan sulit tercapai jika moral para pelaku perbankan tidak digalakkan. Dengan demikian, kewajiban untuk menerapkan tata kelola perusahaan muncul bukan hanya karena kepatuhannya, tetapi juga karena menjadi kebutuhan dan harus dihayati sebagai budaya perusahaan. Selain itu, hal ini terkait dengan kurangnya pemahaman yang luas tentang prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik di dunia bisnis dan masyarakat umum terkait pentingnya tata kelola yang baik dalam hal kelangsungan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Manossoh, Hendrik. (2017). *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Norlive Kharisma Indonesia.
- Maradita, Aldira. (2014). Karakteristik *Good Corporate Governance* Pada Bank Syariah dan Konvensional. *Jurnal Yuridika*. Volume 29. No.2
- Muhamad. (2016). *Manajemen Keuangan Syariah; Analisia Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mujahidin, Akhmad. (2013). *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prasojo. (2015). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*. Volume 2. No.1.

- Romdhoni, Abdul Haris. (2015). Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. Vol.16
- Siswanti, Indra. (2016). Implementasi Good Corporate Governance Pada Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Volume 7. Nomor 2.
- Sodiq, Ahmad. (2017). Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG): Studi Kasus pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung. Volume 1 Nomor 2.
- Sulistiyorini. (2009). Manajemen Pendidikan Islam. Yogyakarta: Teras
- Utama, Andrew Shandy. (2018). Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2 No. 2.
- Wibowo, Edy dan Untung Hendy Widodo. (2005). Mengapa Memilih Bank Syariah? Bogor: Ghalia Indonesia.